

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Arikunto Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Fattah Nanang 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar : Pustaka Refleksi
- Miriam Budiharjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,
Yogyakarta : Liberty

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas
Lampung

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada

Sugeng Budiharsono, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir
Dan Lautan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4
Tahun 2009*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Tingkat Nasional

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
23/Permen-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor 3 /PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis
Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang
Pencadangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai
Taman Pulau Kecil Kota Padang

C. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan) yang diakses pada pukul

15.20 WIB tanggal 19 Oktober 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang yang diakses pada pukul

22.13 WIB tanggal 23 Oktober 2016

<https://www.metroandalas.co.id/beritapulaupulaudiperairankotapadangbelump>

[unyaizinpengelolaan](#) yang diakses pada pukul 14.06 WIB tanggal 5

September 2017

<http://setkab.go.id/menteri-kelautan-dan-perikanan-koordinasikan->

[pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](#) yang diakses

pada pukul 20.08 WIB tanggal 5 September 2017

http://www.transparansi.or.id/Otonomi_Daerah.pdf yang diakses pada pukul

[19.28](#) WIB tanggal 3 Oktober 2017

